



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIF MAPPIASSE
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 58330

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.150.000.000

1. Tanah Seluas 98 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 960 m2 di BONE, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/27 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 315 m2 di LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 240 m2 di LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, RUSH MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.096.576**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.431.096.576



III. HUTANG

Rp. 215.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.216.096.576

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.